

Peran UMKM dalam Meningkatkan PAD: Studi Kasus Perdagangan dan Jasa

Duwi Diyan Pratiwi, Tutik

Universitas Negeri Semarang

duwipratiwi230201@gmail.com , tutik@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

Small, Micro, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic sector in developing the economy. In addition, MSMEs are also a place for people to create jobs so that they can reduce poverty. This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in increasing Regional Original Income (PAD), with a case study of the trade and services sector around Semarang State University (UNNES) in 2025 and the importance of policy support and continuous mentoring for MSMEs so that economic potential can be increased in increasing PAD. The research method used in this study is a qualitative approach and uses data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that MSMEs around UNNES have a significant influence on PAD through payment of levies, local taxes, and job creation. In addition, the relationship between the local government, the university, and MSME actors is also a very important factor in driving the economic growth of the region.

Keywords: MSMEs, Regional Original Income, Trade, Services

ABSTRAK

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang strategis dalam membangun perekonomian. Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan studi kasus sektor perdagangan dan jasa di sekitar lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2025 serta pentingnya dukungan kebijakan dan pendampingan berkelanjutan terhadap UMKM agar potensi ekonomi dapat ditingkatkan dalam peningkatan PAD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di sekitar UNNES berpengaruh secara signifikan terhadap PAD melalui pembayaran retribusi, pajak daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah, pihak kampus, dan pelaku UMKM juga menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kata kunci: UMKM, Pendapatan Asli Daerah, Perdagangan, Jasa

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia dibangun berdasarkan pada pemerataan pembangunan, kemandirian perekonomian, dan keadilan sosial sebagaimana telah dicantumkan pada Pasal 33 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, perekonomian

Indonesia merujuk pada pendekatan perekonomian rakyat, yang mana sektor informal dan usaha menengah seperti UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan struktur perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak dapat hanya dilakukan pengukuran melalui PDB, namun juga peran aktif dari masyarakat melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi (Seventeen & Fahmi, 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini karena UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat tinggi dan menjangkau masyarakat kecil. Baik secara global maupun nasional, UMKM punya posisi strategis, terutama dalam menghadapi era digitalisasi. UMKM adalah motor utama ekonomi, menyumbang sekitar 90% dari total bisnis dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja (Ismail et al., 2023). Di negara-negara berkembang, UMKM tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tapi juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Khususnya di Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM juga menjadi solusi untuk masalah pengangguran dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan (Aliyah, 2022).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan skala ekonomi yang kecil hingga menengah (Sofyan, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria tertentu terkait omset dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, peran UMKM dapat dilihat dari bagaimana kontribusi UMKM terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudrartono et al., 2022). Di tingkat daerah UMKM sektor perdagangan dan jasa ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan pendidikan sekitar Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya. Penerimaan ini dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (. et al., 2021:34). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sidiq, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapatkan melalui wilayah itu sendiri dengan melakukan pemungutan sesuai dengan daerah yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku (Suwarsa & Hasibuan, 2021). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dari pendapatan keuangan daerah pada kegiatan tugas pemerintahan dan dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat daerah meliputi retribusi daerah, hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan sejenisnya (Dwi Anggraeni, 2022).

Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi di Jawa Tengah bahkan termasuk 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia ini memiliki sistem ekonomi yang cukup signifikan. Keberadaan mahasiswa, dosen, dan beberapa kegiatan kampus juga dapat mempengaruhi layanan perdagangan dan jasa di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat memberikan peluang bagi para pelaku UMKM agar dapat berkembang sekaligus berkontribusi secara langsung melalui pajak dan retribusi.

Penelitian dari (DIRANI, 2023) yang berjudul “Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi Provinsi Jambi” Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor UMKM belum berjalan optimal. Ini terjadi karena masih ada kendala-kendala yang menghambat potensi UMKM untuk dimaksimalkan. Selanjutnya, Penelitian (Mahayuni & Widanta, 2021) yang berjudul “Pengaruh Modal, Teknologi Informasi, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Sektor Perdagangan di Denpasar Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Secara lebih rinci, modal, teknologi informasi, dan jam kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di sektor perdagangan, khususnya di Kecamatan Denpasar Timur. Terakhir Penelitian (Pramono & Azis, 2020) yang berjudul “Perkembangan UMKM Sektor Perdagangan di Kota Banda Aceh tahun 2013 - 2019” Berdasarkan pengolahan data, UMKM sektor perdagangan di Kota Banda Aceh mengalami perkembangan signifikan sebesar 214,65% dari tahun 2013 hingga 2019, dengan total 37.237 unit usaha. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor utama: (a) Dukungan Pemerintah: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan berupa peralatan kerja, modal usaha, dan pelatihan, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pemasaran produk; dan (b) Pemanfaatan Teknologi Digital: Para pelaku usaha juga memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk promosi dan penjualan produk melalui platform *online* atau *marketplace*. Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang menghambat perkembangan UMKM di sektor ini, yaitu keterbatasan modal serta kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan.

Meskipun UMKM di sektor perdagangan dan jasa mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki UMKM dengan kontribusinya terhadap PAD. Dengan adanya kejadian tersebut terdapat beberapa masalah utama yang di timbulkan seperti belum maksimalnya data dan izin usaha UMKM di sektor perdagangan dan jasa yang menghambat proses penarikan retribusi dan pajak secara adil, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah seperti dalam mekanisme pembayarannya, minimnya strategi pemerintah daerah dan para pelaku UMKM dalam membangun sistem ekonomi, tidak meratanya kontribusi UMKM terhadap PAD antara sektor perdagangan dan sektor jasa, serta

masih banyak UMKM yang tidak tercatat secara resmi sebagai penyumbang PAD meskipun dari mereka memiliki jumlah pendapatan yang cukup besar (Kusumah & Darmawan, 2023).

Namun demikian, belum banyak studi yang mengkaji secara spesifik bagaimana UMKM di sekitar kampus UNNES berkontribusi terhadap PAD di Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UMKM dalam meningkatkan PAD, dengan fokus penelitian ini pada sektor perdagangan dan jasa di sekitar lingkungan UNNES. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi melalui UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran UMKM sektor perdagangan dan jasa di sekitar Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan sekitar kampus UNNES Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang memiliki konsentrasi UMKM di bidang perdagangan dan jasa (Agustini et al., 2023). Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2025. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM sektor perdagangan dan jasa di sekitar UNNES. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria beroperasi minimal 2 tahun, memiliki izin usaha atau tercatat di Dinas Koperasi & UMKM atau kelurahan, serta bersedia memberikan data keuangan dan pajak usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM dan pihak pemerintah daerah guna mencari tahu bagaimana persepsi, pengalaman, dan data mengenai kontribusi terhadap PAD (Harahap, 2020). Selain itu, observasi atau pengamatan secara langsung terhadap aktivitas ekonomi UMKM di lapangan guna memahami peran mereka dalam perekonomian daerah. Dan juga dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dengan mengkaji beberapa dokumen seperti laporan PAD, data retribusi dan pajak UMKM, serta dokumen perencanaan daerah terkait UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari survei terhadap 120 pelaku UMKM mitra sekitar UNNES pada tahun 2025, diperoleh informasi bahwa sebanyak 78 UMKM bergerak di sektor perdagangan seperti ritel, kios, warung kelontong, dan grosir. Sedangkan 42 UMKM bergerak pada sektor jasa seperti jasa kebersihan atau *laundry*, *cathering*, jasa antar jemput, atau servis peralatan rumah tangga (Kementerian Pendidikan Tinggi, 2025). Sebagian besar UMKM tersebut memiliki omset kurang dari Rp 500.000.000/ tahun dengan rata-rata memiliki tenaga kerja 2-5 orang dan tergolong sebagai usaha mikro. Beberapa UMKM mitra UNNES juga telah

mendapatkan pendampingan dari LPPM UNNES yang bertujuan memberikan pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, serta fasilitasi legalitas usaha seperti izin edar, serta sertifikasi halal (Owo, 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor UMKM ini dapat dilihat melalui retribusi usaha, pajak daerah termasuk pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak jasa serta pendapatan dari perizinan usaha. Berdasarkan estimasi pajak daerah yang dapat dari UMKM perdagangan dan jasa di Kecamatan Gunungpati diperoleh data bahwa:

Tabel 1. Pendapatan PAD Kota Semarang Tahun 2023-2025

Tahun	Kontribusi Pajak & Retribusi (Rp)	PAD Kota Semarang (Rp Triliun)	Persentase Kontribusi (%)
2023	432.000.000	2,12 T	0,0204%
2024	491.000.000	2,25 T	0,021%
2025	562.000.000 (hingga Juli 2025)	2,31 T	0,024%

Sumber: Bapenda Semarang

Data di atas menunjukkan bahwa UMKM ini setiap tahun mengalami peningkatan terhadap pertumbuhan PAD. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut adalah UNNES bekerja sama dengan BAPPENDA Kota Semarang untuk mengadakan *workshop* pembukuan digital menggunakan aplikasi Siantri. Target dalam pelatihan ini adalah para pelaku UMKM di sektor perdagangan dan jasa di sekitar UNNES. Sehingga peningkatan ini bisa terjadi karena masyarakat sudah lebih mengetahui akan hal pembukuan dalam usahanya dan mulai melakukan catatan keuangan sehingga akses pembiayaan pajak yang mereka lakukan lebih mudah (Annisahr, 2025).

Salah satu bentuk implementasi program tersebut adalah adanya program pengabdian pada salah satu UMKM Batik di Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian dosen yang memperoleh pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES dalam rangka melakukan pengenalan teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah batik. Dalam pengabdian ini mengusung ide terkait inovasi alat Elektrolisis skala rumah tangga. Melalui alat ini bertujuan untuk melakukan penjernihan limbah cair batik melalui proses pemisahan partikel melalui bantuan arus listrik dan elektroda yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengurangan warna dan kekeruhan air limbah dengan signifikan. Melalui kegiatan ini memiliki tujuan untuk ikut serta memberikan dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada SDGs 6 (air bersih dan sanitasi), SDGs 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), SDGs 13 (penanganan perubahan iklim, dan SDGs 14 (ekosistem laut).

Hasil observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi di sekitar wilayah

UNNES seperti kelurahan Sekaran, Mangunsari, Patemon dan Ngijo menunjukkan bahwa jumlah UMKM di sektor perdagangan dan jasa sekitar UNNES menunjukkan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah UMKM di Wilayah UNNES Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah UMKM	Keterangan pertumbuhan
2023	183 unit	Total awal data setelah observasi
2024	197 unit	Tumbuh 7,6 % setelah diadakan pelatihan digital
2025	215 unit	Data hingga Juli 2025

Sumber: Data Primer, 2025

Jenis UMKM yang mendominasi adalah warung makan, angkringan, dan beberapa *cafe*. Kemudian *laundry* dan kos kost-an yang ada di sekitar UNNES. Dan jasa *fotocopy, printing, counter handphone* dan peralatan rumah tangga lainnya. Disini peran para mahasiswa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. UMKM sektor olahan pangan menjadi yang paling mendominasi di wilayah UNNES dikarenakan memiliki pasar yang luas, khususnya kalangan mahasiswa yang tentu akan mencari makanan dengan harga terjangkau. Dalam menjalankan upaya pengembangan pendapatan UMKM, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti modal dan tenaga kerja, *E-commerce*, dan pendidikan.

UMKM yang telah menerapkan teknologi digital, terutama dalam hal pemasaran melalui media sosial dan *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram Business mengalami peningkatan penjualan rata-rata sebesar 20-30%. Selain itu, adanya fasilitasi pelatihan desain kemasan, *digital marketing*, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi sederhana memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional UMKM. Penerapan digitalisasi secara langsung memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta mendorong peningkatan transaksi usaha. Hal ini berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah usaha yang berdampak pada peningkatan pajak usaha terhadap PAD (Suot et al., 2021).

Meninjau peraturan baru, besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM dalam skema Pajak Penghasilan (PPh) Final memiliki sifat yang ringan dan sederhana. Besaran pajak yang dikenakan sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan. Namun, terdapat pengecualian yang dapat menjadikan keringanan tersebut menjadi lebih besar. Setiap pelaku UMKM yang mempunyai omzet di bawah Rp 500 juta dalam satu tahun tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak. Pajak dengan besaran 0,5% baru akan dikenakan dan dibayarkan apabila omzet tahunan telah melebihi batas yang ditentukan (Judijanto Loso et al., 2024).

Penerapan tarif pajak 0,5% dengan batas omzet tidak kena pajak mencapai Rp 500 juta bertujuan untuk melakukan penyederhanaan administrasi perpajakan terhadap pelaku UMKM. Sistem ini memberikan tarif UMKM atas kerumitan dalam melakukan pencatatan laba rugi. Hal ini dikarenakan pajak dihitung langsung dari

omzet bukan atas keuntungan bersih. Skema pembayaran pajak menjadi insentif besar bagi UMKM untuk menjadi legal dan terdaftar dengan resmi. Melalui kemudahan ini, pemerintah memiliki harapan untuk semakin banyak UMKM yang memiliki keberanian untuk mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui kepemilikan status legal ini, tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengurusan pajak namun juga membuka akses bagi setiap UMKM untuk memperoleh bantuan atau pinjaman modal dari bank.

Hasil observasi langsung menunjukkan bahwa UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional cenderung lebih taat dalam membayar pajak serta lebih aktif dalam mengikuti program-program pemerintah. sebanyak 90% dari UMKM mitra UNNES membayar pajak dan retribusi secara berkala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anto selaku pemilik usaha toko alat tulis dalam wawancara:

"Iya, karena legalitas itu penting dan saya selalu membayar pajak tepat waktu tentu biar enggak kena denda ya"

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Ibu Sumirah pemilik usaha makanan yang menyebutkan bahwa pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional serta membayar pajak tepat waktu dalam wawancara:

"Tentu ya kita sebagai pemilik usaha harus mendaftarkan usaha kita agar memiliki izin resmi dan juga sebagai warga negara juga kita harus ikut berkontribusi untuk membayar pajak tepat waktu"

Hal ini menunjukkan bahwa proses legalitas usaha tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap tertib administrasi di daerah tersebut. Membayar pajak sendiri merupakan kewajiban penting tidak hanya bagi pemilik usaha (UMKM) namun juga bagi setiap warga negara.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) punya peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran ini terbagi dua:

1. Secara langsung, UMKM menyumbang PAD dengan membayar pajak daerah dan retribusi. Meskipun jumlahnya kecil per unit, jika dikumpulkan dari ribuan hingga jutaan UMKM, kontribusinya sangat signifikan bagi pemerintah daerah.
2. Secara tidak langsung, UMKM berperan lebih luas. Mereka adalah penggerak utama ekonomi lokal yang menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini memperkuat daya beli dan memicu perputaran uang yang lebih sehat. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini pada akhirnya akan memperluas basis pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin maju UMKM di

suatu wilayah, semakin kuat pula ekonominya, sehingga potensi PAD untuk membiayai pembangunan dan layanan publik pun akan ikut membesar.

Peran UMKM berdampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan jasa mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selama tahun 2025, UMKM mitra UNNES berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 300 orang, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar dan mahasiswa yang bekerja di *part-time*. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dari para pelaku UMKM sebesar 10-15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM mampu memberikan efek terhadap perekonomian daerah dan peningkatan daya beli masyarakat (Kusuma et al., 2025).

Disisi lain, UMKM di wilayah UNNES juga berperan besar dalam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Pengaruh yang diberikan tidak hanya dari segi ekonomi namun juga sosial. Dari segi ekonomi, keberadaan UMKM di suatu wilayah memberikan dampak positif dan nyata. Berikut adalah poin-poin utamanya: (a) Menciptakan Lapangan Kerja: UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, bahkan bagi mereka yang pendidikannya terbatas. Ini membantu menurunkan angka pengangguran di daerah tersebut; (b) Meningkatkan Pendapatan: UMKM memberi penghasilan kepada pemilik dan karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki taraf hidup; (c) Meratakan Ekonomi: Karena UMKM tersebar luas hingga ke pedesaan, mereka membantu mendistribusikan kekayaan dan peluang ekonomi, sehingga mengurangi kesenjangan antara kota dan desa; dan (e) Memicu Ekonomi Lokal: Uang dari kegiatan UMKM berputar di komunitas setempat. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan mendorong pertumbuhan bisnis lain, seperti toko kelontong atau jasa transportasi (Judijanto, 2025).

Sedangkan dari segi sosial, UMKM di wilayah UNNES juga punya pengaruh besar pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah rinciannya: (a) Mengentaskan Kemiskinan: UMKM efektif dalam mengurangi kemiskinan karena menyediakan pekerjaan dan penghasilan, yang membantu individu dan keluarga mencapai kemandirian finansial; (b) Memberdayakan Perempuan: Banyak UMKM dijalankan oleh perempuan. Hal ini memberi mereka kemandirian ekonomi, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat peran mereka di keluarga dan masyarakat; (c) Mengembangkan Keterampilan Lokal: UMKM sering fokus pada produk unik yang menggunakan keterampilan tradisional. Ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menjadi tempat pelatihan praktis bagi masyarakat untuk belajar keterampilan baru; dan (e) Mempererat Hubungan Sosial: UMKM sering menjadi pusat interaksi sosial. Hubungan baik antara pemilik, karyawan, dan pelanggan bisa memperkuat ikatan komunitas dan menumbuhkan rasa memiliki di antara warga. Secara keseluruhan, peran UMKM lebih dari sekadar bisnis. Mereka

adalah pendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat paling bawah dan membangun fondasi sosial yang lebih kuat untuk komunitas yang mandiri dan sejahtera (Meliana & Dewi, 2025).

Dalam hal ini, UMKM mitra UNNES telah berkontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak dan Retribusi. Setiap UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak bangunan usaha tersebut. Di samping itu, juga terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Final yang harus dibayarkan oleh setiap UMKM di wilayah UNNES yang telah mencapai omzet tertentu. Apabila setiap pemilik UMKM di wilayah UNNES membayarkan pajak tersebut dengan tepat waktu dan patuh berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disisi lain, UMKM di wilayah UNNES juga memiliki kewajiban untuk membayarkan retribusi agar dapat memperoleh layanan pemerintah seperti pembayaran retribusi izin usaha, penggunaan fasilitas umum, biaya kebersihan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UMKM dengan memiliki izin berusaha yang legal akan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, UMKM dalam mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat melalui perannya dalam menciptakan perputaran perekonomian yang meluas. Dalam hal ini mencakup: (a) Terciptanya lapangan pekerjaan, UMKM dapat melakukan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Melalui hal ini akan meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat yang mana akan menjadi pendorong daya beli masyarakat yang mana aktivitas konsumsi juga akan mengalami peningkatan; dan (b) Meningkatnya perputaran uang lokal, setiap pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM di wilayah UNNES dan karyawannya sebagian besar akan dibelanjakan terhadap lingkungan sekitar seperti pembelian bahan baku, dan sebagainya. Terjadinya perputaran keuangan yang baik dan sehat akan menjadikan dasar perekonomian yang lebih kuat lagi sehingga berpengaruh terhadap besar pajak dan retribusi daerah Kota Semarang.

Meskipun kontribusi UMKM di wilayah UNNES terhadap PAD Kota Semarang mengalami peningkatan, ada beberapa hambatan yang di hadapi seperti persaingan yang ketat antar pelaku usaha, keterbatasan pembiayaan, rendahnya literasi keuangan dan pajak. Di samping itu, masih terdapat UMKM di wilayah UNNES yang masih memiliki kesadaran pajak yang rendah khususnya pada usaha mikro dimana mereka belum memiliki pemahaman penuh atas kewajiban untuk membayar pajak. Dimana belum cukupnya pengetahuan yang dimiliki terkait pajak mencakup perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak yang benar. Disisi lain, pelaku UMKM juga masih memiliki kesadaran yang rendah terkait pentingnya pembayaran pajak terhadap pembangunan negara. Hal ini disebabkan bahwa mereka masih memiliki anggapan bahwa pajak yang telah dibayarkan tidak memiliki manfaat secara langsung terhadap bisnis yang dimiliki. Di samping itu, masih ditemui juga pelaku

UMKM yang memiliki pandangan bahwa pajak menjadi salah satu faktor pengurang keuntungan yang dinilai memberatkan, khususnya pada saat bisnis sedang dirintis atau sedang dalam keadaan tidak stabil. Mereka memiliki anggapan bahwa pajak akan dapat mengurangi modal yang seharusnya dapat dialokasikan pada pengembangan usaha.

Sementara itu, UMKM di wilayah UNNES juga masih ditemui memiliki kekurangan dalam sumber daya manusia yang memahami administrasi dan keuangan. Sehingga, pemilik harus melakukan pengurusan seluruh operasional usaha hanya sendiri. Hal ini mengakibatkan seringnya dilakukan mengesampingkan urusan terkait perpajakan karena dianggap sulit dan rumit. Kemudian juga ditemukan bahwa UMKM masih belum memiliki sistem pembukuan yang sistematis dan tercatat rapi. Sehingga, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi mereka dalam melakukan perhitungan omzet secara akurat. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan bagi mereka untuk melakukan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pembayaran pajak tidak tepat waktu oleh pelaku UMKM di wilayah UNNES mencakup: (a) Administrasi yang masih dianggap susah dan rumit, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan sistem, prosedur administrasi mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak masih terdapat anggapan yang kompleks bagi sebagian pelaku UMKM di wilayah UNNES. Disisi lain juga dipengaruhi adanya keterbatasan akses terhadap teknologi digital dan internet; dan (b) Kurangnya sosialisasi yang efektif, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait wajib pajak dan retribusi bagi pelaku UMKM belum sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM dengan merata dan berkelanjutan. Kurangnya pendekatan secara personal sering mengakibatkan gagalnya penumbuhan kesadaran dan pemahaman yang mendalam.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat, pemerintah dan pelaku UMKM perlu bekerja sama. Solusinya meliputi penyederhanaan sistem administrasi dan digitalisasi agar pelaporan serta pembayaran pajak lebih mudah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi harus lebih intensif, tidak hanya lewat seminar, tapi juga dengan pendampingan langsung. Pemerintah juga perlu lebih transparan dalam penggunaan dana pajak untuk membangun kepercayaan. Terakhir, literasi keuangan pelaku UMKM harus ditingkatkan melalui pelatihan pembukuan sederhana. Jika semua langkah ini dilakukan, kepatuhan pajak UMKM diharapkan akan meningkat dan kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan studi kasus sektor perdagangan dan jasa di lingkungan mitra Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa UMKM sektor perdagangan dan jasa

memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Semarang terutama melalui retribusi usaha, pajak daerah, dan perizinan kemudian digitalisasi dan inovasi usaha terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM baik dari sisi omset, perluasan usaha, maupun efisiensi operasional dan strategi *digital marketing*, sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi, serta peningkatan produk, legalitas usaha berperan strategis karena UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban pajak, serta lebih aktif dalam mengakses bantuan dan pelatihan dari pemerintah. Dampak sosial ekonomi UMKM sangat nyata khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selama tahun 2025. Hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengoptimalkan kontribusi terhadap PAD mencakup tingginya persaingan para pelaku usaha, keterbatasan akses permodalan dan atau teknis serta administratif, serta rendahnya literasi mengenai keuangan dan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan studi kasus sektor perdagangan dan jasa di lingkungan mitra Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2025 dapat diberi saran bahwa untuk ke depannya pemerintah daerah atau dari pihak UNNES sendiri bisa lebih aktif lagi dalam memberikan informasi atau sosialisasi terhadap pelaku UMKM di sekitarnya agar para pelaku UMKM lebih taat lagi dalam membayar pajak atau pun pembayaran lainnya yang sekiranya masih belum di mengerti oleh mereka, diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut para pelaku UMKM lebih taat lagi dalam membayar pajak daerah, retribusi, atau dalam mendaftarkan izin usaha mereka sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat per tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, A. G., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulangi, R. (2023). *Metode penelitian kualitatif (Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif)* (Irmayanti, Ed.; Edisi 1). PT Mirfandi Mandiri Digital.
- Anggraeni, P. D. (2022). Pengaruh kunjungan wisata, UMKM, pajak hiburan, retribusi pariwisata terhadap PAD Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 289–299.
- Annisahrr. (2025, Juli). Hadirkan inovasi berdampak, UNNES dorong UMKM batik ramah lingkungan. *Universitas Negeri Semarang*. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari <https://unnes.ac.id>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif* (H. Sazali, Ed.; Edisi 1). Wal Ashri Publishing.
- Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM dalam penguatan ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>

- Judijanto Loso, Abdillah, J., Nugrahanti, T. P., Rustam, A., Apriyanto, Pagiling, N., & Mayndarto, E. C. (2024). *Akuntansi untuk UMKM*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, L. (2025). Reformasi pajak dan peningkatan kepatuhan UMKM: Studi literatur atas implementasi tarif PPh final dan simplifikasi administrasi. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 306–314.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025, April 29). Dorong kemajuan UMKM, LPPM UNNES damping 16 koperasi. *Kemdiktisaintek*. Diakses pada 6 Agustus 2025, dari <https://kemdikti.go.id>
- Kusuma, W. R., Perdana, D. A., Putra, B. T., & Majid, M. G. D. (2025). Upaya pendampingan hukum bagi pemilik kos di wilayah UNNES terkait izin dan pajak. *Kampus Akademik Publishing*, 2(2), 276–287.
- Kusumah, M. B. A., & Darmawan, A. (2023). Perancangan desain kemasan UMKM Nusapad (Nusantara desk pad) dalam membentuk citra produk. *Prosiding NARSISTIK 2023: Positioning Pendidikan DKV Berkejaran dengan Perkembangan Industri dan Teknologi Informasi*.
- Meliana, & Dewi, N. M. S. S. (2025). Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan pajak: Studi kualitatif Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11414>
- Owo. (2025, Agustus 6). KemenKopUKM gandeng lembaga inkubator UNNES dan Hetero Space ciptakan wirausaha baru. *Harian Ekonomi Neraca*. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari <https://neraca.co.id>
- Seventeen, W. L., & Fahmi, P. (2025). Kontribusi pajak UMKM terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 8(1), 52.
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, Agustina, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Maknunah, L. U., Witi, F. L., Nuryanti, & Sudirman, A. (2022). *Kewirausahaan UMKM di era digital*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suot, C. G., Kawung, G. M. V., & Tumilaar, R. (2021). Pengaruh sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 403–411.
- Suwarsa, T., & Hasibuan, A. R. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan periode 2018–2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(2).